

**ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
JALAN TOL PADANG – PEKANBARU**

(Studi Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Limapuluh Kota)

SKRIPSI



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2022

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pengadaan tanah pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum tidak lepas dari adanya konflik. Konflik yang terjadi disebabkan karena sulitnya izin dari masyarakat untuk membebaskan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis manajemen penyelesaian konflik dari pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di ruas Payakumbuh-Pangkalan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus, dengan pemilihan informan secara *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kolaborasi (negosiasi) dan kompromi (dialog alternatif) dari 5 teori gaya-gaya manajemen penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Thomas dan Kilmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses manajemen penyelesaian konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol, tidak ditemukannya keberhasilan dalam proses tersebut. Baik penyelesaian yang dilakukan secara kolaborasi (proses negosiasi dalam permintaan pengalihan jalur) maupun penyelesaian secara kompromi (musyawarah dalam penyampaian alasan penolakan dan permintaan pengalihan jalur) oleh masyarakat terdampak dengan pemerintah daerah. Hal itu terjadi karena, sudah terdapat putusan pemerintah atas jalur yang telah ditetapkan meskipun masyarakat telah sering melakukan penolakan terhadap pemerintah dan tim pelaksana jalan tol. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa proses manajemen penyelesaian konflik secara kolaborasi dan kompromi tidak dapat menjadi proses yang tepat dalam penyelesaian konflik antara masyarakat terdampak yang melakukan penolakan atas jalur pelaksanaan jalan tol dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana jalan tol Padang-Pekanbaru ruas Payakumbuh-Pangkalan.

Kata Kunci : Pengadaan tanah, Konflik, Jalan Tol



ABSTRACT

Land acquisition issues on the toll road construction for the welfare of the general public cannot be separated from conflicts. The conflict is caused by the difficulty of gaining permission from the community to acquire the land. This study aims to explain and analyze the conflict management of the land acquisition for Padang – Pekanbaru toll road construction along the Payakumbuh – Pangkalan road. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach and purposive sampling. In this study, the researcher applies the theory of collaborating (negotiation) and compromising (alternative dialogue) which are taken from the Five Major Conflict Management Styles stated by Thomas and Kilmann. According to the findings of this study, there is a failure in the conflict management of the land acquisition for the toll road construction. The local government influences both the collaborating method (a negotiation process to request a route modification) and the compromising method (a discussion to deliver the reason for the refusal and the request for a route modification) used by the community. It occurs because the government has decided the final route, despite the fact that the community frequently expresses opposition to the government and the toll road construction team. Based on this, it can be concluded that the collaborating and compromising method cannot be the appropriate conflict management style for resolving the conflict between the community that is opposed to the toll road construction and the local government as the construction team of the Padang – Pekanbaru toll road construction, which will be built along the Payakumbuh – Pangkalan road.

Keywords: Land acquisition, Conflict, Toll Road

